



STRATEGI KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

Salsabila Yusni Yuniar

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi calon anggota legislatif perempuan dalam Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat 2024, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka. Judul penelitian dipilih untuk menyoroti pentingnya pemahaman mendalam mengenai dinamika politik lokal yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik. Penggunaan teori feminisme politik dan pendekatan partisipatif sebagai landasan teoritis memungkinkan analisis kritis terhadap peran gender dalam politik dan bagaimana perempuan dapat mengatasi hambatan struktural. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kasus, wawancara mendalam dengan para calon perempuan, serta analisis dokumen kampanye dan hasil pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kampanye yang melibatkan pendekatan personal, program kerja realistis, dan dukungan dari tokoh masyarakat lokal berperan signifikan dalam kesuksesan calon perempuan. Namun, tantangan seperti keterbatasan pendanaan, stereotip gender, dan resistensi terhadap perubahan di dalam partai politik masih menjadi penghalang utama. Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan dari partai politik dan struktur sosial yang mendukung partisipasi perempuan sangat penting untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen. Kesimpulannya, meskipun ada kemajuan dalam kesetaraan gender dalam politik, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi hambatan yang ada dan memaksimalkan potensi perempuan dalam politik lokal.

Kata Kunci: Strategi Kampanye, Calon Perempuan, Pemilu 2024

Abstract

This research examines the strategies of female legislative candidates in the 2024 West Bandung Regency General Election, with a focus on the challenges they face and the factors that influence their success. The research title was chosen to highlight the importance of an in-depth understanding of local political dynamics that influence women's participation in politics. The use of feminist political theory and participatory approaches as a theoretical foundation that allows critical

analysis of gender roles in politics and how women can overcome structural obstacles. The methodology used in this research includes case studies, in-depth interviews with female candidates, as well as analysis of campaign documents and election results. The research results show that campaign strategies that include a personal approach, realistic work programs, and support from local community leaders play a significant role in the success of female candidates. However, challenges such as limited funding, gender stereotypes, and resistance to change within political parties remain major obstacles. This research also finds that support from political parties and social structures that support women's participation are very important to increase women's representation in parliament. In conclusion, although there has been progress in gender equality in politics, further efforts are needed to overcome existing barriers and maximize the potential of women in local politics.

Keywords: Campaign Strategy, Female Candidates, 2024 Election.

PENDAHULUAN

Sangat penting untuk memahami bahwa keterwakilan perempuan dalam politik terkait dengan kesetaraan gender dan pertumbuhan yang inklusif, selain keterwakilan. Perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan berkontribusi pada penciptaan kebijakan yang lebih beragam, responsif terhadap masyarakat, dan berfokus pada anak dan perempuan ketika mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, meskipun terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi, inisiatif untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam politik di Indonesia terus berlanjut, didorong oleh pengakuan akan pentingnya kesetaraan gender dan keterlibatan perempuan dalam prosedur politik dan kemajuan negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara jelas mengatur keterwakilan perempuan di bidang politik. Sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 UU tersebut, partai politik yang mencalonkan kandidat untuk pemilihan umum diwajibkan untuk menyediakan minimal 30% keterwakilan perempuan di antara kandidat mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 55 ayat

(1), "Partai politik wajib menyertakan bakal calon anggota legislatif perempuan sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari jumlah keseluruhan bakal calon anggota legislatif yang diajukan." Dengan demikian, UU No. 2/2008 adalah undang-undang pertama dalam sejarah Indonesia yang secara jelas menetapkan kuota keterwakilan perempuan dalam politik. Tujuan dari kuota ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan di negara ini.

Perempuan hanya sedikit terlibat sebelum UU No. 2/2008 tentang Partai Politik disahkan. Undang-undang ini menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan. Beberapa dari sekian banyak hambatan yang sering dihadapi perempuan ketika mencoba terlibat dalam politik adalah ketidaksetaraan gender, akses terbatas ke sumber daya dan pendidikan, dan norma-norma budaya yang menjunjung tinggi supremasi laki-laki di lapangan.

Pengesahan UU No. 2/2008 merupakan langkah besar ke arah yang benar untuk menutup kesenjangan gender di bidang politik. Dalam rangka meningkatkan jumlah kemungkinan bagi perempuan untuk terlibat dan membuat pilihan dalam politik nasional, partai-partai politik didorong untuk memasukkan lebih banyak perempuan dalam daftar kandidat mereka dengan penerapan kuota 30%. Tindakan afirmatif untuk perempuan dalam politik telah menjadi lebih canggih dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat pada saat DPR menghasilkan RUU Paket Politik yang digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu 2009 yakni UU Penyelenggara Pemilu No. 22 Tahun 2007, UU Partai Politik No. 2 Tahun 2008, dan UU Partai Politik No. 10 Tahun 2008. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menetapkan bahwa perempuan harus memenuhi sekurang-kurangnya 30% dari komposisi penyelenggara pemilu. Kehadiran perempuan dalam politik Indonesia masih menjadi isu penting

dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan kesetaraan gender. UU Pemilu menetapkan kuota minimal 30% untuk kandidat perempuan dalam daftar calon legislatif, dilansir dari beberapa sumber Persentase perempuan yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia bervariasi tergantung pada periodenya.

Berpijak dari latar belakang tentang keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia, penting untuk menggarisbawahi bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan politik tetap menjadi tantangan berkelanjutan. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah menetapkan kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik, implementasinya masih menemui berbagai hambatan, termasuk budaya patriarki yang kuat dan akses terbatas terhadap sumber daya politik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana Strategi Kampanye Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini, yang merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang rinci tentang fenomena sosial. Dengan judul "Strategi Kampanye Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024," teknik penelitian kualitatif dapat diterapkan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai taktik kampanye pemilihan umum yang digunakan oleh calon legislatif perempuan. Dalam penelitian kualitatif, informasi dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya dengan mengunjungi daerah tersebut dan membuat permintaan, atau peneliti dapat meminta bantuan orang lain yang juga mengumpulkan data dengan metode yang sama (Sahir, 2021). Adapun informan dalam penelitian ini

meliputi: 1) Kandidat calon legislative perempuan; 2) Bawaslu dan KPU; 3) Ketua Partai Politik; 4) Masyarakat Umum; dan 5) Tokoh Masyarakat.

Selanjutnya, Teknik pengambilan data dalam penelitian ini peneliti lakukan melalui 3 (tiga) instrument, yakni: 1) Wawancara; 2) Studi kepustakaan; dan 3) Observasi.

Setelah data terkumpul selama pelaksanaan penelitian ini, analisis data dilakukan selama konstruksi teori tergantung pada kebutuhan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metodologi penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

PEMBAHASAN

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung Barat berada di dataran tinggi, yang memiliki medan yang bervariasi yang meliputi dataran rendah, pegunungan, dan perbukitan. Di antara gunung-gunung yang terkenal di daerah ini adalah Gunung Tangkuban Perahu. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sekitar 1.756,67 km². Kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, adalah sebagai berikut, Terdapat 165 desa dan 16 kelurahan di Kabupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari lima daerah pemilihan (dapil): Dapil I meliputi Kecamatan Ngamprah, Padalarang, dan Saguling, sedangkan Dapil II meliputi Kecamatan Cikalongwetan, Cipeundeuy, dan Cipatat. Selanjutnya, Dapil IV Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cililin, dan Dapil III Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua. Terakhir, Dapil V Kecamatan Cipongkor, Rongga, Gununghalu.

Adapun jumlah keseluruhan calon anggota legislatif Kabupaten Bandung Barat pada pemilihan umum tahun 2024

sebanyak 628 orang dengan rincian dan persentase per-daerah pemilihan sebagai berikut:

a. Daerah Pemilihan 1 (Padalarang,Saguling, Ngamprah)

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Caleg Keseluruhan (P+L)	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase Calon Anggota Legislatif Perempuan (%)
1	PKB	11	3	27%
2	Gerindra	11	4	36%
3	PDIP	11	4	36%
4	Golkar	11	4	36%
5	Nasdem	11	3	27%
6	Partai Buruh	11	4	36%
7	Gelora	7	2	29%
8	PKS	11	4	36%
9	PKN	7	2	57%
10	Hanura	6	1	17%
11	Garuda	1	0	0%
12	PAN	11	3	27%
13	PBB	10	3	30%
14	Demokrat	11	3	27%
15	PSI	8	2	25%
16	Perindo	11	4	36%
17	PPP	11	3	27%
18	Partai Ummat	3	1	33%
Jumlah		163	52	32%

b. Daerah Pemilihan 2 (Cipatat, Cipendeuy, Cikalongwetan)

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Caleg Keseluruhan (P+L)	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase Calon Anggota Legislatif Perempuan (%)
1	PKB	10	3	30%
2	Gerindra	10	3	30%
3	PDIP	10	3	30%
4	Golkar	10	3	30%
5	Nasdem	10	4	40%
6	Partai Buruh	8	2	25%
7	Gelora	8	2	25%
8	PKS	10	3	30%
9	PKN	3	2	67%
10	Hanura	4	2	50%
11	Garuda	-	-	0%
12	PAN	10	3	30%
13	PBB	9	3	33%

14	Demokrat	10	2	20%
15	PSI	4	1	25%
16	Perindo	9	3	33%
17	PPP	10	2	20%
18	Partai Ummat	3	1	33%
Jumlah		13	42	30%

c. Daerah Pemilihan 3 (Cisarua, Parongpong, Lembang)

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Caleg Keseluruhan (P+L)	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase Calon Anggota Legislatif Perempuan (%)
1	PKB	11	5	45%
2	Gerindra	11	3	27%
3	PDIP	11	4	36%
4	Golkar	11	4	36%
5	Nasdem	11	3	27%
6	Partai Buruh	3	2	67%
7	Gelora	5	2	40%
8	PKS	11	4	36%
9	PKN	7	4	57%
10	Hanura	3	1	33%
11	Garuda	-	-	0
12	PAN	11	3	27%
13	PBB	8	3	38%
14	Demokrat	11	3	27%
15	PSI	11	3	27%
16	Perindo	3	1	33%
17	PPP	11	5	45%
18	Partai Ummat	1	-	0
Jumlah		14	50	36%

d. Daerah Pemilihan 4 (Batujajar, Cihampelas, Cililin)

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Caleg Keseluruhan (P+L)	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase Calon Anggota Legislatif Perempuan (%)
1	PKB	9	3	33%
2	Gerindra	9	3	33%
3	PDIP	9	2	22%
4	Golkar	9	3	33%
5	Nasdem	9	3	33%
6	Partai Buruh	9	3	33%
7	Gelora	8	2	25%
8	PKS	9	3	33%
9	PKN	7	3	43%

10	Hanura	1	0	0%
11	Garuda	-	-	0%
12	PAN	9	3	33%
13	PBB	6	3	50%
14	Demokrat	9	3	33%
15	PSI	4	1	25%
16	Perindo	6	2	33%
17	PPP	9	5	56%
18	Partai Ummat	2	1	50%
Jumlah		12	43	35%

e. Daerah Pemilihan 5 (Cipongkor, Sindangkerta, Gununghalu, Rongga)

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Caleg Keseluruhan (P+L)	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase Calon Anggota Legislatif Perempuan (%)
1	PKB	9	3	33%
2	Gerindra	9	3	33%
3	PDIP	9	3	33%
4	Golkar	9	3	33%
5	Nasdem	9	3	22%
6	Partai Buruh	2	1	50%
7	Gelora	6	2	33%
8	PKS	9	3	33%
9	PKN	5	1	20%
10	Hanura	3	1	33%
11	Garuda	0	0	0%
12	PAN	9	3	33%
13	PBB	6	2	33%
14	Demokrat	9	3	33%
15	PSI	6	2	33%
16	Perindo	5	2	40%
17	PPP	9	3	33%
18	Partai Ummat	1	0	0%
Jumlah		11	37	32%

Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat untuk periode 2024-2029, terdapat total 628 calon anggota legislatif yang bersaing untuk merebut kursi di berbagai daerah pemilihan. Dari jumlah tersebut, Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Bandung Barat menampilkan 115 calon legislatif, dengan 78 di antaranya

laki-laki dan 37 perempuan. Proporsi calon legislatif perempuan di Dapil 5 adalah 32%, yang menunjukkan upaya signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, angka ini juga mencerminkan ketidakseimbangan gender yang masih ada, mengingat partisipasi perempuan di seluruh calon masih kurang dari sepertiga.

Dalam hal perbandingan, proporsi calon perempuan di Dapil 5 dapat dianggap sebagai indikator positif untuk upaya-upaya menuju keseimbangan gender yang lebih baik di tingkat kabupaten. Namun, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk peningkatan. Calon legislatif perempuan di Dapil 5 harus memanfaatkan peluang ini dengan pendekatan yang berfokus pada pengembangan pesan yang menarik, memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih secara efektif, serta berkoalisi dengan organisasi dan kelompok perempuan untuk memperluas jangkauan kampanye mereka.

Rekomendasi dari analisis ini mencakup penguatan dukungan terhadap calon perempuan, termasuk memberikan pelatihan dan akses ke sumber daya yang diperlukan. Selain itu, penting untuk mempromosikan kesetaraan gender secara lebih luas untuk mengurangi stereotip dan diskriminasi yang mungkin menghambat peluang perempuan dalam politik. Evaluasi dan penyesuaian strategi kampanye calon perempuan berdasarkan umpan balik pemilih juga dapat meningkatkan efektivitas dan peluang keberhasilan mereka. Meskipun partisipasi perempuan di Dapil 5 menunjukkan kemajuan, masih ada tantangan signifikan yang harus dihadapi untuk mencapai keseimbangan gender yang lebih baik dalam politik Kabupaten Bandung Barat. Upaya berkelanjutan dan dukungan yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik di tingkat kabupaten. Selain itu, penting bagi partai politik untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam

mendukung calon perempuan. Partai politik dapat menjadi katalisator perubahan dengan menerapkan kebijakan internal yang mendukung keterwakilan perempuan, seperti kuota gender atau insentif bagi calon perempuan yang potensial. Selain memberikan pelatihan dan sumber daya, partai juga perlu memastikan bahwa calon perempuan mendapatkan eksposur yang cukup dalam kampanye dan debat publik. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk bersuara dan menunjukkan kapabilitas mereka, partai politik dapat membantu memecahkan hambatan struktural yang seringkali menghalangi perempuan untuk maju dalam dunia politik. Ini bukan hanya soal menambah jumlah calon perempuan, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki platform yang kuat untuk mengadvokasi isu-isu yang relevan dan berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat kabupaten.

Hasil penelitian mengenai partisipasi calon perempuan di Dapil 5 Kabupaten Bandung Barat dapat dianalisis dalam kerangka teori strategi politik yang dikemukakan oleh Peter Schroder (Schroder, 2013). Schroder membagi strategi politik menjadi dua jenis utama: ofensif dan defensif. Dalam konteks ini, calon legislatif perempuan yang berusaha untuk meningkatkan keterwakilan dan memperluas pengaruh mereka di tingkat kabupaten dapat dikategorikan sebagai mengadopsi strategi ofensif. Mereka berupaya untuk menembus pasar politik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, melalui pendekatan proaktif seperti pengembangan pesan yang menarik, penggunaan media sosial secara efektif, dan membangun koalisi dengan organisasi perempuan.

Di sisi lain, strategi defensif mungkin lebih terlihat pada upaya mempertahankan posisi yang sudah ada, dengan memastikan dukungan terus berlanjut dari pemilih setia serta melawan stereotip dan diskriminasi yang mengancam peluang mereka. Dengan memadukan kedua strategi ini menyerang pasar

politik yang lebih luas sambil mempertahankan basis dukungan yang ada calon perempuan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka dan berkontribusi pada keseimbangan gender dalam politik lokal.

Strategi kampanye calon anggota legislatif perempuan pada Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang saling terkait, yang dapat dianalisis melalui berbagai indikator. Salah satu kelebihan utama adalah efektivitas dalam menyusun dan menyampaikan pesan kampanye yang relevan dengan isu-isu lokal, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pesan-pesan ini dirancang untuk beresonansi dengan kelompok pemilih tertentu, terutama perempuan dan keluarga muda, yang merasa aspirasinya diwakili. Namun, kekurangan muncul ketika akses terhadap media massa dan platform komunikasi efektif terbatas, sehingga pesan tidak selalu mencapai audien yang lebih luas. Dalam hal mobilisasi dukungan, calon perempuan memanfaatkan jaringan komunitas dan organisasi perempuan untuk memperkuat basis dukungan. Ini memberikan mereka keunggulan dalam membangun hubungan personal yang kuat dengan pemilih di tingkat komunitas. Namun, keterbatasan dana dan sumber daya logistik sering kali menghambat kemampuan mereka untuk menjangkau pemilih di daerah terpencil atau di komunitas yang kurang terorganisir.

Akses terhadap sumber daya kampanye merupakan tantangan signifikan bagi banyak calon perempuan. Meskipun beberapa berhasil mendapatkan dukungan dari partai politik atau organisasi pemberdayaan perempuan, mayoritas masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana dan materi kampanye yang memadai. Keterlibatan calon perempuan dalam kegiatan komunitas adalah aset penting, karena mereka sering kali lebih diterima oleh kelompok-kelompok lokal yang berfokus pada isu-isu sosial. Namun, tantangan muncul ketika mereka harus

membagi waktu antara kampanye dan tanggung jawab komunitas, yang dapat mengurangi efektivitas kampanye mereka. Terakhir, dalam menghadapi dinamika politik lokal, calon perempuan umumnya lebih adaptif, tetapi kurangnya pengalaman politik sering kali menjadi penghambat dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, seperti serangan politik dari calon lain atau perubahan kebijakan mendadak. Secara keseluruhan, meskipun strategi ini memiliki potensi besar untuk mendobrak hambatan gender, masih diperlukan dukungan yang lebih kuat dan terstruktur untuk mengatasi kekurangan yang ada, sehingga calon perempuan dapat bersaing secara lebih efektif dan mencapai representasi yang lebih inklusif di pemerintahan lokal.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada kemajuan dalam partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bandung Barat, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Budaya patriarki yang kuat, persaingan ketat, dan keterbatasan sumber daya menghambat kesetaraan gender dalam politik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang inklusif, peningkatan kapasitas calon perempuan dalam kampanye, dan dukungan yang lebih baik dari partai politik serta lembaga pengawas. Dengan upaya yang berkelanjutan dan perencanaan strategis, calon perempuan dapat memaksimalkan potensi mereka dan berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan representasi gender ditingkat legislatif. Beberapa calon Perempuan menunjukkan keberhasilan melalui strategi kampanye yang memperkuat keterhubungan emosional dengan pemilih dan relevansi program kerja mereka. Dukungan dari partai politik dan penerapan kuota keterwakilan perempuan oleh KPU memberikan peluang bagi calon perempuan untuk bersaing secara adil. Namun, dukungan ini sering kali tidak konsisten dan tergantung pada tingkat komitmen partai terhadap kesetaraan. Pendekatan proaktif dan terencana dalam kampanye telah menunjukkan keberhasilan dalam menyusun program kerja

yang relevan dan hubungan personal dengan pemilih. Namun, hambatan administratif, keterbatasan finansial, dan dukungan yang tidak memadai dari partai politik sering kali menjadi penghalang signifikan bagi efektivitas kampanye yang komprehensif. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan representasi perempuan, hambatan ini mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan dukungan politik yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: PENERBIT KBM INDONESIA.

Schroder, P. (2013). *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fur die freiheit.